

## THE EFFECT OF SOCIAL REVOLUTION IN SUMATRA MALAY SULTANATE EAST, YEAR 1946-1947

**Maulimardewa\*, Prof.Dr.Isjoni, M.Si\*\*, Drs.Kamaruddin, M.Si\*\*\***  
Email: [dewastory11@gmail.com](mailto:dewastory11@gmail.com), [isjoni@yahoo.com](mailto:isjoni@yahoo.com), [kamaruddinoemar@gmail.com](mailto:kamaruddinoemar@gmail.com)  
Cp: 082388597747

**Social Science Departement  
History Education FKIP-University Of Riau  
Bina Widya Street, Km. 12,5 Pekanbaru**

***Abstract:** The eruption of social revolution in East Sumatra can not be separated from the attitude of the sultans, kings and feudal lords in general, were not so enthusiastic about the independence of Indonesia because after Japan entered the Japanese government to revoke all privileges of the nobility and plantation land expropriated by the workers. The nobility did not feel happy and hope to get their rights back by working together with the Dutch / NICA, further distanced himself from the pro-republican. Meanwhile, the pro-republican national committee urges the East Sumatra region so special regions like the autonomous governments / kingdoms abolished and replaced it with the people's democratic government in accordance with the spirit of the struggle for independence. But the pro-republik itself split into two camps; moderates who want a cooperative approach to persuade the nobility and the radicals that prioritizes street violence with the mass mobilization of the workers perkebunan. Hasil this study shows that the social revolution in East Sumatra, destroying what was left of the Republican government in East Sumatra. Officials of survivors preferring locked herself in their house. Like this become the revolutionary momentum for change in government.*

**Keywords:** Social Revolution, East Sumatera

## **PENGARUH REVOLUSI SOSIAL TERHADAP KESULTANAN MELAYU DI SUMATERA TIMUR, TAHUN 1946-1947**

**Maulimardewa\*, Prof.Dr.Isjoni, M.Si\*\*, Drs.Kamaruddin, M.Si\*\*\***  
Email: [dewastorv11@gmail.com](mailto:dewastorv11@gmail.com), [isjoni@yahoo.com](mailto:isjoni@yahoo.com), [kamaruddinoemar@gmail.com](mailto:kamaruddinoemar@gmail.com)  
Cp: 082388597747

**Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial  
PendidikanSejarah FKIP-Universitas Riau  
Jl. Bina Widya Km. 12,5 Pekanbaru**

**Abstrak:**Meletusnya revolusi sosial di Sumatera Timur tidak terlepas dari sikap sultan-sultan, raja-raja dan kaum feodal pada umumnya, yang tidak begitu antusias terhadap kemerdekaan Indonesia karena setelah Jepang masuk, pemerintah Jepang mencabut semua hak istimewa kaum bangsawan dan lahan perkebunan diambil alih oleh para buruh. Kaum bangsawan tidak merasa senang dan berharap untuk mendapatkan hak-haknya kembali dengan bekerja sama dengan Belanda/NICA, sehingga semakin menjauhkan diri dari pihak pro-republik. Sementara itu pihak pro-republik mendesak kepada komite nasional wilayah Sumatera Timur supaya daerah istimewa seperti pemerintahan swapraja/kerajaan dihapuskan dan menggantikannya dengan pemerintahan demokrasi rakyat sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Namun pihak pro-republik sendiri terpecah menjadi dua kubu; kubu moderat yang menginginkan pendekatan kooperatif untuk membujuk kaum bangsawan dan kubu radikal yang mengutamakan jalan kekerasan dengan penggalangan massa para buruh perkebunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revolusi sosial di Sumatera Timur menghancurkan apa yang masih tersisa dari pemerintahan Republik di Sumatra Timur. Pejabat-pejabat yang selamat lebih memilih mengurung dirinya di rumahnya masing-masing. Keadaan seperti ini menjadi momentum para revolusioner untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan.

**Kata kunci :** *Revolusi Sosial, Sumatera Timur*

## PENDAHULUAN

Indonesia mulai memasuki zaman penjajahan Jepang yang membuat situasi perekonomian semakin sangat sulit. Tanpa ada rasa kemanusiaan dan belas kasihan masyarakat Indonesia dijajah tanpa ampun, semua sumber daya alam dipakai habis demi kepentingan Jepang dalam pertempuran Asia Timur Raya. Setelah mendapat kabar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pada saat itulah golongan muda dan golongan tua sebagai pejuang kemerdekaan berupaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia walaupun terjadi perbedaan pendapat sebelumnya diantara golongan muda dan golongan tua. Setelah melalui beberapa insiden pra proklamasi, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia di kumandangkan. Berita kemerdekaan pun di upayakan tersebar ke seluruh penjuru tanah air. Dikarenakan, sulitnya komunikasi dan transportasi, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus baru dibawa oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera dan Mr. Amir selaku Wakil Gubernur Sumatera dan diumumkan di Lapangan Fukereido (sekarang Lapangan Merdeka), Medan pada tanggal 6 Oktober 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan AFNEI dibawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Kedatangan pasukan AFNEI ini diboncengi oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan dan membebaskan tawanan perang orang-orang Belanda di Medan. Gejolak demi gejolak terjadi di negeri ini namun bukan lagi datang dari para penjajah akan tetapi lebih kepada yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan pusat maupun daerah. Hal senada juga terjadi di Sumatera Timur. Kebencian demi kebencian tertanam dalam jiwa masyarakat yang dipengaruhi oleh dendam masa lalu. Dendam itu tertuju pada pemimpin-pemimpin mereka yang selama ini semena-mena terhadap rakyat.<sup>1</sup>

Meletusnya revolusi sosial di Sumatera Timur tidak terlepas dari sikap sultan-sultan, raja-raja dan kaum feodal pada umumnya, yang tidak begitu antusias terhadap kemerdekaan Indonesia karena setelah Jepang masuk, pemerintah Jepang mencabut semua hak istimewa kaum bangsawan dan lahan perkebunan diambil alih oleh para buruh. Kaum bangsawan tidak merasa senang dan berharap untuk mendapatkan hak-haknya kembali dengan bekerja sama dengan Belanda/NICA, sehingga semakin menjauhkan diri dari pihak pro-republik. Sementara itu pihak pro-republik mendesak kepada komite nasional wilayah Sumatera Timur supaya daerah istimewa seperti pemerintahan swapraja/kerajaan dihapuskan dan menggantikannya dengan pemerintahan demokrasi rakyat sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Namun pihak pro-republik sendiri terpecah menjadi dua kubu; kubu moderat yang menginginkan pendekatan kooperatif untuk membujuk kaum bangsawan dan kubu radikal yang mengutamakan jalan kekerasan dengan penggalangan massa para buruh perkebunan.

---

<sup>1</sup>Syair Anwar, Umar Amin. 1986/1987. *Sejarah Daerah Riau*. Pekanbaru: Depdikbud, Hal. 412

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian data tidak dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan peristiwa tersebut. Kemudian penelitian menggunakan pendekatan sejarah (*history*).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat diperpustakaan daerah Soeman HS, Perpustakaan Universitas Riau, Perpustakaan FKIP, Perpustakaan Sejarah, dan tempat-tempat lain yang menurut penulis dapat memberikan informasi tentang Revolusi Sosial di Sumatera Timur dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sebab Terjadinya Revolusi Sosial**

Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di Jakarta, namun realisasinya belum terwujud di seluruh Indonesia khususnya di Sumatera. Berita kemerdekaan Republik Indonesia yang terlambat sampai ke Sumatera dikarenakan sulitnya komunikasi serta transportasi, sehingga berita kemerdekaan Indonesia baru dibawa oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera dan Mr. Amir selaku Wakil Gubernur Sumatera dan diumumkan di Lapangan Fukereido (sekarang Lapangan Merdeka), Medan pada tanggal 6 Oktober 1945. Berita proklamasi tersebut belum juga dapat direalisasikan secepat mungkin disebabkan oleh keadaan di Sumatera Timur pada saat itu masih banyak sultan yang mengharapkan kedatangan Belanda kembali ke Sumatera Timur. Para penguasa lokal atau Sultan yang ada di Sumatera Timur masih menginginkan kedudukannya kembali seperti pada masa kekuasaan Belanda, sehingga pada saat Jepang meninggalkan Sumatera Timur para penguasa atau sultan membentuk panitia untuk menyambut kedatangan Belanda kembali di Sumatera Timur. Hal ini memicu kemarahan rakyat sehingga mulailah timbul gejolak yang mengarah pada kekerasan. Rakyat menginginkan sistem pemerintahan yang bercorak demokrasi sehingga kekuasaan kaum feodal harus dihapuskan.<sup>2</sup>

### **B. Proses Terjadinya Revolusi Sosial**

Kekerasan yang dimulai 3 Maret 1946 paling parah terjadi di Tanjung Balai Asahan, di sini tidak terdapat adanya suatu kekuatan moderat antara pemuda bersenjata dan segolongan pejabat pendukung kerajaan. Satu-satunya kekuatan TKR (Tentara Keamanan Rakyat)/ TRI (Tentara Republik Indonesia) di seluruh kabupaten ini

---

<sup>2</sup>Mayjen TNI (Purn) H.R Sjahnan SH., 1982. *Dari Medan Area ke Pedalaman dan Kembali ke Kota Medan*. Medan: Dinas Sejarah Kodam-II/BB., Hlm. 9

hanyalah sepasukan kecil di Tanjung Balai yang condong menyokong Kerajaan. Para pemimpin kelompok-keompok bersenjata pemuda Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Napindo (Nasional Pelopor Indonesia) dan Sabilillah semuanya adalah orang-orang politik yang belum berpengalaman. Sejak pagi ribuan massa telah berkumpul. Mereka mendengar bahwa Belanda akan mendarat di Tanjung Balai. Namun kerumunan itu berubah haluan mengepung istana Sultan Asahan. Awalnya gerakan masa ini dihadang TRI namun karena jumlahnya sedikit, masa berhasil menyerbu istana sultan

Tengku Musa adalah yang pertama dalam daftar mereka. Dia dengan istri Belandanya dan seisi rumahnya disergap pada 3 Maret malam. Semuanya segera dibunuh. Besok harinya semua aristokrat melayu yang pria di kota itu ditangkap dan kemudian dibunuh juga. Dalam beberapa hari sudah sekitar 140 orang kedapatan mati terbunuh di kota itu, termasuk beberapa penghulu dan pegawai-pegawai didikan Belanda, serta seluruh kelas “tengku”. Sebagian besar janda dan anak-anak mereka mati, ini kemudian diasingkan dan rumah mereka digeledah untuk mencari harta. Istana dijadikan gedung rakyat dan juga dijadikan markas yang mewah oleh Pesindo<sup>3</sup>

Tindakan yang lebih ganas telah dilakukan di lima kerajaan kecil daerah Labuhan Batu, jauh di Selatan Sumatra Timur. Menurut suatu laporan persatuan perjuangan, sebabnya ialah di daerah ini “raja-rajanya telah menindas tanpa kenal batas terhadap rakyat dan kaum pergerakan”. Gerakan pertama pada 3 Maret hanya dilancarkan pada ibukota distrik, Rantau Prapat, tempat kedudukan Sultan Kualah. Wakil pemerintah, Tengku Hasnan dan tiga pembantu utamanya disergap pada tengah malam dan dibawa ke pinggir sungai yang curam untuk dibunuh. Tengku Hasnan dan Tengku Long dipenggal kepalanya, sedangkan dua lainnya sempat lebih dulu terjun ke sungai menyelamatkan dirinya. Pada waktu yang sama istana Sultan Kualah di Tanjung Pasir dikepung, kemudian diserbu dan semua penghuninya ditawan. Sultan yang tua serta berhati keras itu bersama salah seorang putranya besoknya diketemukan sedang sekarat karena tusukan-tusukan tombak di kuburan Cina. Beberapa pemuda membawanya ke “rumah sakit”, tetapi sejak itu dia tidak pernah dijumpai lagi. Lain-lain orang penting dalam pemerintahan kerajaan juga dibunuh dan keluarganya ditawan.

Daerah kesultanan besar, Deli, Serdang dan Langkat mendapat perlawanan. Serdang yang memang dalam sejarahnya anti-Belanda tidak terlalu dibenci masyarakat dan juga terlindung karena ada markas pasukan TRI di Perbaungan. Kota kedudukan sultan, berada dibawah pimpinan Kapten Tengku Noerdin. Kapten ini adalah seorang aristokrat muda serdang, bekas perwira latihan Giyugundan Tengku Nizam yang menjadi ketua KNI (Komite Nasional Indonesia) daerah itu. Kapten Noerdin mendapat persetujuan dari kolonel Ahmad Tahir untuk mengambil kekuasaan di tangannya sendiri.

---

<sup>3</sup>Patologi Sebuah Revolusi: Catatan Anthony Reid tentang Revolusi Sosial di Sumatera Timur Maret 1946, Wara Sinuhaji, Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra USU, Historisme, Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007

## **C. Pengaruh Yang Ditimbulkan dari Adanya Revolusi Sosial Terhadap Kesultanan Melayu di Sumatera Timur Tahun 1946-1947**

### **1. Hancurnya Pemerintahan Raja-Raja**

Perpecahan timbul di kalangan kerajaan dan kelompok-kelompok pemuda pejuang yang terjadi di Sumatera Timur berkembang semakin parah. Pemuda sesungguhnya memiliki kekuatan fisik, tetapi mereka terpecah belah sehingga usaha tersebut hanya menimbulkan hantu anarki. Disatu sisi pihak kerajaan tetap mempertahankan pemerintahannya yang semakin tersisih perlahan – lahan dari tangga kekuasaannya. Pengaruh raja-raja Melayu dan Simalungun sekarang hanya terbatas pada pengikut- pengikut sesukunya sendiri di daerah-daerah pedesaan.

Kekacauan yang terjadi sebenarnya sudah dicegah oleh Mr.T.M.Hasan dan Wakil gubernurnya Dr. Amir namun kemampuan keduanya belum berhasil untuk itu. Sewaktu Mr.T.M.Hasan berada di Aceh pada pertengahan Desember, Dr. Amir bersama Mr. Luat dan dua pemimpin dari Sumatera Barat, Adinegoro dan Dr. Djamil berangkat ke Jakarta atas tawaran sekutu. Dengan menerima tawaran ini, Dr. Amir berarti sudah tidak lagi memperkuat posisinya. Inggris bermaksud menghadapkan tokoh-tokoh Sumatera ini agar menerapkan pengaruh politik moderat dan pragmatis Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Setelah kembali dari Jakarta pada tanggal 3 Januari 1946, Dr.Amir semakin dicurigai dengan keterangannya yang mengatakan “Pemerintah Republik di Jawa menganggap Sumatera secara politik dan ekonomi tidak tergantung pada Jawa dan bebas menjalankan setiap tindakan yang tidak bertentangan dengan kepentingan Republik”. Akibat pernyataannya tersebut beberapa pemuda mencoba menculik Amir sehingga Mr.T.M. Hasan terpaksa membuat pernyataan tegas yaitu di Sumatera tidak akan menjalankan politik yang tersendiri atau berbeda dari politik pemerintah pusat di Jawa.

Untuk mengatasi perpecahan di seluruh Indonesia antara pemuda dan pejabat serta untuk memperkuat kedudukan pemerintahan, maka sosialis Sjahrir mengumumkan pada 23 November 1946 pembentukan “Komite Nasional Indonesia Daerah, atau KNI-daerah. KNI – KNI ini sudah banyak berdiri di berbagai tempat berdasarkan keanggotaan hokokai atau shu sangi kai, dan sekarang harus disusun kembali sebagai badan – badan perwakilan yang mencerminkan imbalanced keuangan yang baru dan mampu bersama pejabat – pejabat menjalankan pemerintahan. KNI yang baru untuk daerah Sumatera Timur telah dibentuk pada awal Desember dengan Luat Siregar sebagai ketuanya. Komite – komite nasional lainnya juga dibentuk pada setiap kabupaten dan kota penting lainnya selama bulan Januari. Proses penyaringan untuk KNI kota Medan merupakan cara pemilihan yang teratur meskipun tidak secara langsung. Sistem perwakilan yang disetujui antara Mr. Joesoef dan wakil dari KNI Sumatera Timur ialah dalam bentuk pembagian 50 kursi yang kira – kira sama diantara tiga blok. Blok pertama mewakili golongan – golongan revolusioner dan marxist, termasuk tiga wakil masing – masing dari PKI, PNI dan Pesindo, blok kedua golongan – golongan agama dan sosial termasuk tiga wakil MIT dan dua dari Sabillillah dan blok ketiga, wakil – wakil dari sektor – sektor kota dan golongan minoritas non Indonesia. Waktu dua bulan yang diperlukan untuk melaksanakan proses seleksi ini merupakan petunjuk bahwa cara – cara yang lebih kasar mungkin telah dipergunakan di tempat – tempat lain.

Terbentuknya KNI – KNI yang sudah diperbarui ini segera memberikan kekuatan dan pengakuan baru kepada tokoh – tokoh politik yang lebih mapan dan

moderat. Sebagai ketua dari KNI Sumatra Timur terutama Laut Siregar sudah bulat sikapnya bahwa raja – raja itu harus menerima semangat demokrasi yang dibawa perubahan zaman. Dia dan Dr. Amir sudah begitu terkesan oleh kerja sama yang harmonis antara Republik dan Kesultanan Jogja ketika mereka berkunjung ke Jawa. Segera setelah mereka kembali dari Jawa pada 12 Januari, mereka membicarakan dengan bekas majikan Dr. Amir, Sultan Langkat untuk memprakarsai dan menjadi tuan rumah suatu konferensi kerajaan yang akan membahas masalah ini di Tanjung Pura.

Kenyataan adanya dua tokoh besar dunia kesusasteraan dari Sumatra Timur, Tengku Amir Hamzah (Wakil Pemerintah NKRI untuk Langkat) dan Dr. Amir yang bisa menjadi penghubung antara Kesultanan Langkat dan Republik mungkin telah menjadi sebab mengapa Langkat sepenuhnya bisa bekerja sama dalam usaha ini. Serdang, satu – satunya kesultanan yang kesetiannya sejak semula telah diragukan oleh Belanda, mengirim ke konferensi itu putra mahkotanya, Tenku Anwar, seorang administrator pemerintahan yang cakap. Juga hadir dua datuk dari Deli, tetapi tidak seorangpun utusan dari Kesultanan Asahan “berhalangan karena perhubungan”. Dalam konferensi itu Dr. Amir menguraikan bagaimana raja – raja di Jawa telah menjadi demokrasi dilaksanakan juga dengan selekas-lekasnya dalam kerajaan di Sumatra Timur ini. Pertemuan itu menyetujui supaya dewan – dewan perwakilan didirikan secepat mungkin pada setiap wilayah dan untuk sementara para sultan dan pejabat – pejabatnya akan “memerintah dengan bekerja bersama dengan serapat – rapatnya” dengan KNI – KNI setempat.<sup>4</sup>

## **2. Terhapusnya Kekuasaan Feodal atau Kekuasaan Kerajaan Menjadi Kekuasaan yang Berdemokrasi dan Berdaulat**

Kekerasan 3 maret menghancurkan apa yang masih tersisa dari pemerintahan Republik di Sumatra Timur. Pejabat-pejabat yang selamat lebih memilih mengurung dirinya di rumahnya masing-masing. Keadaan seperti ini menjadi momentum para revolusioner untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan. Perubahan yang dimaksud adalah menghapus kekuasaan yang feodal atau kerajaan menjadi kekuasaan yang demokrasi atau berdasarkan kedaulatan rakyat. Tokoh-tokoh perubahan itu adalah pemimpin-pemimpin PKI dalam pemerintahan, Luat Siregar dan Joenoes Nasution sebagai posisi kunci dengan Dr. Amir sebagai tokoh ideal yang melakukan perubahan itu. Sebagai Pejabat Gubernur Dr. Amir bekerja keras dan menunjukkan keberanian dengan memimpin berturut-turut dari satu rapat ke rapat lain, mengeluarkan banyak pengumuman Pemerintah. Dr. Amir bekerjasama dengan Inggris dan menyakinkan Inggris bahwa ia adalah penganut komunis dan mencoba berkhotbah didepan Pesindo dalam gaya dan bahasa revolusi. Tindakan Dr. Amir seperti itu telah menunjukkan terjadinya Revolusi Sosial.

Lalu Dr. Amir mengumumkan sebuah pengumuman. Dengan tiba-tiba seluruh rakyat Sumatra Timur bertindak menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman didaerah masing-masing. Hal itu menunjukkan gerakan revolusi sosial yang hebat.

---

<sup>4</sup>[http://ikhti.blogspot.com/2013/06/revolusi-sosial-di-sumatera-timur\\_25.html](http://ikhti.blogspot.com/2013/06/revolusi-sosial-di-sumatera-timur_25.html)google.com

Tindakan rakyat untuk melakukan perubahan feodalis menjadi demokratis harus dilakukan dengan perhitungan laba rugi supaya korban revolusi sosial sedikit. Gaya bahasa Dr. Amir sama dengan gaya Luat Siregar. Dalam pengumuman disebutkan pengangkatan Joenoes Nasution sebagai pejabat penanggung jawab daerah Sumatra Timur dan Mr. Luat Siregar sebagai pejabat pendamai dengan kekuasaan penuh. KNI-KNI setempat telah diminta kerja samanya selama Mr. Luat mengunjungi setiap distrik. Pengumuman ini membingungkan posisi TRI. Pengumuman itu hanya menyebut koordinasi antara pemerintahan baru, Persatuan Perjuangan, KNI, TRI dan Kepolisian. Dalam terbitan Soeloeh Indonesia memuat pengumuman Kolonel Ahmad Tahir bahwa TRI mengambil alih semua pemerintahan di Sumatra Timur sejak tanggal 5 Maret, kecuali kota Medan untuk menghormati Sekutu. Kolonel Tahir dan penasihatnya merasa khawatir dengan tindakan anarki itu.<sup>5</sup>

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. KESIMPULAN

1. Para penguasa lokal atau Sultan yang ada di Sumatera Timur masih menginginkan kedudukan mereka kembali seperti pada masa kekuasaan Belanda, sehingga pada saat Jepang meninggalkan Sumatera Timur para penguasa atau sultan membentuk panitia untuk menyambut kedatangan Belanda kembali di Sumatera Timur. Hal ini memicu kemarahan rakyat sehingga mulai timbul gejolak yang mengarah pada kekerasan. Rakyat menginginkan sistem pemerintahan yang bercorak demokrasi sehingga kekuasaan kaum feodal harus dihapuskan.
2. Kekerasan yang dimulai 3 Maret 1946 paling parah terjadi di Tanjung Balai Asahan, di sini tidak terdapat adanya suatu kekuatan moderat antara pemuda bersenjata dan segolongan pejabat pendukung kerajaan yang keras kepala yang dipimpin Teuku Musa, yang tetap masih mewakili republik "resmi". Sementara di Kesultanan Deli, Istana Sultan Deli yang terletak dekat "benteng" pertahanan sekutu di Medan, begitu "Revolusi sosial" dimulai, begitu istana sudah berada dalam perlindungan Inggris. Tindakan yang lebih lanjut telah dilakukan di lima kerajaan kecil daerah Labuhan Batu, jauh di Selatan Sumatra Timur. Menurut suatu laporan persatuan perjuangan, sebabnya ialah di daerah ini "raja-raja telah menindas dan paksa terhadap rakyat dan kaum pergerakan".
3. Kekerasan 3 maret menghancurkan apa yang masih tersisa di pemerintahan Republik di Sumatra Timur. Pejabat-pejabat yang selamat lebih memilih mengurung dirinya di rumahnyamasing-masing. Keadaan seperti ini menjadi momentum para revolusioner untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan. Perubahan yang dimaksud adalah menghapus kekuasaan yang feodal atau kerajaan menjadi kekuasaan yang demokratis atau berdasarkan kedaulatan rakyat.

<sup>5</sup>[http://ikhti.blogspot.com/2013/06/revolusi-sosial-di-sumatera-timur\\_25.html](http://ikhti.blogspot.com/2013/06/revolusi-sosial-di-sumatera-timur_25.html)google.com

## B. REKOMENDASI

1. Sebagai warganegara Indonesia kita harus memahami tentang peristiwa sejarah yang terjadi di tanah air. Kerusuhan revolusi di Sumatera Timur ini, menjelaskan bahwa tidak ada pemenang yang muncul dari peristiwa ini. Reputasi semua pemimpin penting dirusak oleh kekacauan yang ditimbulkan "revolusi sosial".
2. Pada pembahasan pengaruh revolusi sosial di Sumatera Timur terhadap Kesultanan Melayu tahun 1946-1947, penulis menyarankan kepada setiap warganegara Indonesia menyadari revolusi yang dilakukan dengan cara kekerasan lebih banyak memberikan pengaruh yang negatif terhadap Sumatera Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

Mayjen TNI (Purn) H.R Sjahnan SH., 1982. *Dari Medan Area ke Pedalaman dan Kembali ke Kota Medan*. Medan: Dinas Sejarah Kodam-II/BB.

Patologi Sebuah Revolusi: Catatan Anthony Reid tentang Revolusi Sosial di Sumatera Timur Maret 1946, Wara Sinuhaji, Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra USU, Historisme, Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007

Syair Anwar, Umar Amin. 1986/1987. *Sejarah Daerah Riau*. Pekanbaru: Depdikbud.

[http://ikhti.blogspot.com/2013/06/revolusi-sosial-di-sumatera-timur\\_25.html](http://ikhti.blogspot.com/2013/06/revolusi-sosial-di-sumatera-timur_25.html)google.com